

Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik

Nonni Yap¹, Andy Chandra Pramana², Duwi Riningsih³, Bima Fatkul Khusna A⁴, Eka Agustina⁵

Universitas Kediri - ¹nonni_yap@unik-kediri.ac.id

²andychandra@unik-kediri.ac.id

³dwi_riningsih@unik-kediri.ac.id

⁴jumintenminten350@gmail.com

⁵ekaagustina24.co.id@gmail.com

Abstrak— Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi asset dan kewajiban. Kualitas Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang berdasarkan pada kuesioner kualitas laporan keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Subjek penelitian dan lokasi penelitian adalah pegawai PNS, SKPD, PAKD selaku pengelola laporan keuangan dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan kuesioner.

Keywords: Akuntansi Berbasis Akrual, Kualitas Laporan Keuangan,

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Undang-undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Instansi pemerintahan wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Berkembangnya organisasi pemerintah di Indonesia baik dialami oleh pemerintah pusat maupun daerah, maka akan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik. Terdiri dari dua unsur pokok untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu transparansi dan akuntabilitas. Adanya transparansi dan akuntabilitas ini dibutuhkan suatu pengembangan kebijakan akuntansi berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga dapat mewujudkan laporan keuangan yang baik. Pengembangan kebijakan akuntansi SAP diharapkan dapat memberikan pedoman pokok dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah (Setiawan, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengenai akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi pada saat kas diterima atau dibayarkan (Ayu, 2020). Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh (Permana, I Ghe Yoga & Widnyani, 2020). Adanya SAP dapat

mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Selain pengawasan keuangan juga diperlukan dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik, pengawasan keuangan pada dasarnya dikoordinasikan secara penuh untuk menghindari terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Pengawasan diharapkan dapat membantu menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan akan terciptanya kegiatan yang berkaitan dengan menentukan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kerja yang terjadi (Hayadi,

2019). Oleh karena itu pengawasan keuangan daerah juga penting dilakukan agar dapat meningkatkan nilai informasi yang ada dalam laporan keuangan, sehingga dalam penggunaan anggaran dapat terealisasi sesuai dengan rencana dan tertib pada pertanggungjawabannya (Rifandi, 2018).

Laporan keuangan merupakan media sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat di bandingkan dan dapat di pahami (PP No Tahun 2010). seiring dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Pemerintah diwajibkan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, perubahan laporan keuangan dari basis ke basis akrual memang menjadi tantangan bagi Pemerintah daerah untuk dapat menyelesaikan laporan keuangan agar dapat memberikan informasi-informasi yang di butuhkan bagi para penggunanya untuk itu pemerintah daerah. Kabupaten Gresik sudah menerapkan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Fery Taufik dari Kementrian Dirjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi menyatakan bahwa hambatan yang akan dialami adalah sulitnya pola pikir staf atau pejabat pengelola keuangan, kerumitan, dan beragamnya transaksi keuangan yang dicatat secara akrual, jumlah tenaga pelatih di pemerintahan yang mampu mendidik akuntansi akrual terbatas serta membutuhkan waktu dan usaha yang besar untuk mengembangkan sistem yang handal.

Usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menerapkan sistem berbasis akrual, Pemkab Gresik menggelar bimbingan dan Lokakarya Pengembangan Teknologi informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Sehingga Pemkab Gresik dapat mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual disamping itu pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual dan cara pengimputan data berbasis akrual pada Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD).

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Begitu juga dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan 4 macam opini yaitu: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (Disclaimer atau TMP). Ketika Badan pemeriksa memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini berarti laporan keuangan yang dilaporkan sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan laporan keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipercaya, dan dapat dibandingkan.

Beberapa tahun terakhir telah terlihat dopsi signifikan berbasis akrual oleh beberapa perusahaan sector publik di negara-negara berkembang termasuk dengan disetujuinya PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mengamanatkan organisasi sektor public baik pusat maupun daerah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual (putra & Varina, 2021). Organisasi sektor publik di indonesia secara formal menganut akuntansi akrual sejak 1 januari 2015 sebagai organisasi sektor publik yang menjadi fasilitator juga harus menerapkan basis akrual pada kualitas laporan keuangannya

Namun, beberapa literatur akademik berpendapat bahwa jika akuntansi akrual dimasukkan dalam laporan keuangan sektor publik, diperlukan penelitian lebih lanjut. Apakah sistem akrual benar-benar sesuai untuk perusahaan sektor publik menjadi dasar kesepakatan, persyaratan pendaftaran akun khusus untuk organisasi sektor public yang tidak berlaku untuk organisasi sektor swasta (misalhnya asset bersejarah/warisan, infrastuktur asset, dana modal, dll) hal ini dapat

menunjukkan bahwa pandangan dasar akuntansi akrual sebagai solusi yang terbukti dengan sendirinya dan praktis untuk perusahaan sektor public berdasarkan sasumsi yang terlalu mendasar dari fitur yang sama dengan factor swasta (Kawedar,2017). Ada beberapa pihak yang terlibat, sehingga jika penerapan akuntansi sektor public menimbulkan ambiguitas teknis .

Permendagri No. 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang merupakan pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban APBD mulai dari proses pendataan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Apabila sistem akuntansi tidak diterapkan dengan baik, maka penyusunan laporan keuangan akan terhambat sebagaimana tersebut di atas, sehingga diperlukan penerapan sistem

akuntansi yang baru yaitu penerapan sistem akuntansi akrual yang mengakui pengaruh transaksi dan hal-hal lain pada saat itu. transaksi dan peristiwa, terlepas dari kapan kas atau setara kas diterima (Nyoman Triyadi. Rasmini, 2016).

Selain itu, system pengendalian intern pemerintah juga merupakan system yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Bukti di bidang ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah menempati urutan teratas dalam daftar audit yang dilakukan oleh BPK dan lainnya. BPK sebagai auditor eksternal selalu menguji keandalan sistem pengendalian intern ini dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan sejauh mana pengujiannya yang akan dilakukan. Lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memberikan peluang besar terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD), menuai banyak kritik dari regulator.

Reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik, ditandai dengan adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi, kepada entitas penyelenggara pemerintahan termasuk di lingkungan pemerintah daerah. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi tersebut, dapat terpenuhi salah satunya melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan wadah bagi pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerja pengelolaan keuangan daerah. Ketersediaan informasi keuangan yang berkualitas dalam LKPD akan memudahkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan yang tepat dan selaras dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan, sebab tingkat kualitas informasi yang terkandung akan mempengaruhi kekuatan keputusan yang diambil (Afiah et al., 2020). Berdasarkan hal tersebut kualitas informasi dari laporan keuangan yang disajikan, merupakan hal mendasar yang sepatutnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Namun, tatkala laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas atau bermutu menjadi harapan bagi berbagai pihak yang bersangkutan, harapan tersebut pun tidak selalu dapat terpenuhi, oleh sebab adanya permasalahan atau penyimpangan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Mengacu pada hal tersebut, fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu yang menarik untuk digali lebih dalam.

Instansi pemerintahan wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya reformasi dan pengembangan diperlukan khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat. Perubahan yang signifikan dalam reformasi di bidang keuangan negara adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahannya, yaitu dengan melakukan pembenahan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 (PP No. 24 tahun 2005) tentang SAP berbasis Cash Toward Accrual (SAP CTA) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan segala tanggung jawabnya tidak terlepas dari adanya peran besar sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya. Kompetensi ialah karakter fundamental individu yang berhubungan dengan efektivitas pencapaian kesuksesan kerja, yang dapat direpresentasikan dalam wujud tindakan, perilaku, serta pikiran dalam suatu pekerjaan atau situasi (Afiah et al., 2020; Sari & Ariawaty, 2019). Menurut Muda et al. (2017) kompetensi sumber daya manusia ialah kemampuan yang dikuasai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya dengan berbekal pengetahuan, keterampilan serta pengalaman yang cukup memadai. Sehubungan dengan pengertian tersebut, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi

khususnya di bidang akuntansi, sangat diperlukan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas (Fitriana & Wahyudin, 2017). Penelitian mengenai keterkaitan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sudah beberapa kali dilaksanakan dan memperoleh hasil yang beragam. Beberapa di antaranya yakni Sumaryati et al. (2020) dan Ariyanto (2020) yang memperoleh hasil kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Wijayanti & Handayani (2017) menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan diberlakukan SAP CTA adalah untuk menjembatani pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis akrual. Menurut Widyastuti (2015) Akuntansi berbasis akrual adalah salah satu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa ekonomi lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan aliran masuk atau keluar dari kas sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya yang dicatat. Tujuan umum laporan keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik adalah menyajikan informasi mengenai Posisi Keuangan, Realisasi Anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Arus Kas, Hasil Operasi, dan Perubahan Ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna (stakeholder) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan masih banyak ditemukan ketidak beresan, ketidak teraturan dan ketidak benaran, dan bahkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan termasuk banyak aset yang dikelola secara tidak layak dan dilaporkan secara tidak wajar dalam laporan keuangan yang berimplikasi pada opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik”** untuk mengetahui penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang tidak wajar dan dapat menjadi referensi dan informasi bagi peneliti pemula lainnya untuk melakukan penelitian.

Kualitas Laporan Keuangan merupakan persyaratan normative yang dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik laporan keuangan yang terdapat dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.

Komponen laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 memiliki perbedaan dengan PP No. 24 Tahun 2005 berikut perbedaan nya :

Tabel 1.1
Komponen laporan keuangan

PP No. 24 Tahun 2005	PP No. 71 Tahun 2010
Komponen Laporan Keuangan Pokok : Neraca Laporan Realisasi Anggaran Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan	Komponen Laporan Keuangan Pokok : Laporan Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Kinerja Keuangan

	Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Keuangan Neraca Laporan Operasional Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas Catatan Atas Laporan Keuangan
--	--

Sumber: PP No. 71 Tahun 2010

Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kualitas

yang dihendaki yaitu :

1. Relevan (Memiliki umpan balik, tepat waktu, lengkap)
2. Andal (Penyajian yang jujur, dapat diverifikasi, netral)
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, dalam akuntansi secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan bila dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar, nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan, tetapi dengan memasukan seluruh beban, baik yang sudah dibayar ataupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang, dalam rangka pengukuran kinerja, serta informasi berbasis akrual dipercaya dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya, oleh karena itu akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Widjajerso (2008) menjelaskan beberapa alasan penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu :

1. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi seperti informasi tentang hutang piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
2. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
3. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, SAP berbasis AkruaI adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Menurut hasil pemikiran dapat dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam penerapan SAP berbasis AkruaI, yaitu :

1. Regulasi
2. Sistem dan Sarana Pendukung
3. Sumber Daya Manusia

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada menganalisis bagian program dan keuangan yang berdasarkan peraturan daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pembuat laporan keuangan.

Lokasi Penelitian di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Jln. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan waktu penelitian akan dilakukan kurang lebih selama 2 bulan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berdasarkan pada teknik observasi, wawancara, dan kuesioner data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil objek penelitian. Sedangkan Data sekunder merupakan data dari dokumen objek penelitian berupa laporan tertulis yang dibuat secara berkala. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi
Observasi adalah pengumpulan data secara langsung ke lokasi penelitian.
2. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan dengan pihak pegawai bidang keuangan dalam lingkup Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data, catatan, dan menganalisis dokumen tentang penelitian secara langsung.

1. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana.

Dalam persamaan regresinya dapat ditunjukkan sebagai berikut (Ghozali, 2006):

$$Y = a + bx + e$$

Dimana:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b1 = Koefisien Regresi/Slop (Standar Akuntansi Pemerintahan)

a = Konstanta

e = Nilai Standar error

2. Teknik Analisis Data

- a. Uji Kualitas Data
Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki tingkat keandalan (reliability) dan tingkat kebenaran/keabsahan (validity) yang tinggi.
- b. Uji Validitas
Uji validitas bertujuan untuk mengukur apa yang ingin diukur atau alat ukur yang digunakan mengenai sasaran. Validitas laporan keuangan yang telah disiapkan dapat diukur dengan mengkorelasikan skor komponen dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, pernyataan yang mempunyai nilai koefisien korelasi terhadap skor total lebih kecil dari nilai kritisnya berarti tidak lolos uji validitas dan harus diperbaiki atau dibuang. Untuk menguji validitas antara masing-masing skor total dengan menggunakan rumus teknik korelasi Product Momen. Syarat minimum untuk memenuhi validitas adalah apabila $r = 0,0$. (Sugiyono, 2012: 183).
- c. Uji Reliabilitas
Sugiyono (2012: 268) menyatakan reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama atau peneliti yang sama dalam

waktu berbeda menghasilkan data yang sama atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Untuk uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,6 (Ghozali dalam Irwana, 2010:64).

3. Uji Hipotesis

Untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) merumuskan hipotesis statistik;
- (2) menentukan level of significance () sebesar 5%;
- (3) menghitung besarnya thitung dengan menggunakan SPSS;
- (4) menetapkan kriteria pengujian hipotesis; dan
- (5) menarik kesimpulan berdasarkan uji statistik yang dilakukan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model regresi melewati uji asumsi klasik. Model regresi yang lolos uji asumsi klasik adalah model regresi yang berdistribusi normal dan terlepas atau terbebas dari keadaan multikolinearitas serta heteroskedastisitas, sehingga dapat dinyatakan model regresi layak untuk dilakukan analisis regresi linear berganda. Rangkuman hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat diamati pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	2,579	1,919	-1,344	0,183
Sistem Pengendalian Intern (X1)	0,299	0,085	3,497	0,001
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X2)	0,515	0,127	4,066	0,000
Adjusted R Square	: 0,859			
F hitung	: 91,247			
Sig. F	: 0,000			

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Data Penelitian, 2022

Mengacu pada Tabel 2, dapat dirumuskan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = -2,579 + 0,171X_1 + 0,299X_2 + 0,175X_3 + 0,308X_4 + 0,515X_5 + \epsilon$$

Berdasarkan Tabel 1, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* yakni sebesar 0,859 atau 85,9 persen. Hal tersebut bermakna 85,9 persen variasi variabel dependen atau variabel terikat yakni kualitas laporan keuangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh variasi variabel independen yakni sistem pengendalian intern pemerintah, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Teori Kepatuhan. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua sebagai bentuk kepatuhan atau ketaatan

terhadap peraturan yang ada khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan mematuhi peraturan yang ada, akan tersaji laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar yang sudah berkekuatan hukum. Kredibilitas laporan keuangan yang sudah mengacu pada standar pun tidak akan diragukan lagi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sejenis yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Setiawan dan Gayatri (2017); Wijayanti dan Hendayani (2017); serta Holle et al. (2019) yang menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Pada penelitian ini, peneliti hanya mengambil sampel terbatas di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sehingga hasil penelitian kurang dapat digeneralisasi, berdasarkan keterbatasan yang ada, maka peneliti selanjutnya dianjurkan untuk memperluas lokasi penelitian meliputi OPD di beberapa kabupaten sehingga diharapkan hasil penelitian mempunyai kemampuan generalisasi yang lebih luas. Penelitian ini tentunya belum bisa dikatakan sempurna, namun diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Maka dari hasil penelitian saran yang dapat peneliti sampaikan adalah diharapkan kepada Akuntansi Berbasis Akrual dalam laporan keuangan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzia, Risa Ayu. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. *Skripsi, Jurusan Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung*. Melalui: <http://repository.widyatam.ac.id>. Diakses pada 2 September 2015
- Faradillah, Andi, (2013). Analisis kesiapan pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar akuntansi Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010) (*Skripsi*). Makassar, Universitas Hasanuddin
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Purwita, Erma. (2013). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Kuningan. *Skripsi, Jurusan Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung*. Melalui: <http://repository.widyatama.ac.id>. Diakses 2 September 2015.
- Tanjung, Abdul Hafiz, (2013). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua*, Bandung, Alfabeta.
- Laporan Akhir Kajian. (2012). *Kesiapan Pemda Dalam Implementasi SAP*
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Widyawati, Dini. (2015). Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Akuntansi* vol 1: 1-14.

